Silang Pendapat Keselamatan Rel: Bunda Eva Tagih Janji KAI, Divre IV Polisikan Oknum Pemblokir Jalur

BANDAR LAMPUNG – Isu keselamatan di perlintasan kereta api Kota Bandar Lampung memanas. Wali Kota Eva Dwiana secara terbuka melayangkan kritik tajam dan mendesak PT Kereta Api Indonesia (KAI) Divre IV Tanjungkarang untuk lebih serius memodernisasi fasilitas keselamatan di titik-titik rawan.
Desakan ini muncul di tengah keprihatinan Bunda Eva terhadap perlintasan sebidang yang masih menggunakan pengamanan "tradisional" seperti bambu dan kayu, yang dinilai sangat berisiko bagi nyawa warga.

"Jangan Cuma Bergantung pada Pemda"
Bunda Eva menegaskan bahwa meski Pemkot siap bersinergi, tanggung jawab utama infrastruktur keselamatan ada di tangan PT KAI dan otoritas pusat. Ia meminta perusahaan pelat merah tersebut tidak hanya berpangku tangan menunggu bantuan anggaran pemerintah daerah.

"Kami sangat berharap PT KAI memberikan perhatian lebih serius. Jangan hanya bergantung pada pemerintah daerah, karena cakupan tugas kami sangat luas. Keselamatan warga di sepanjang rel adalah prioritas yang tidak bisa ditunda," tegas Bunda Eva.

Senada dengan itu, Kepala Dinas Perhubungan Bandar Lampung, Socrat Pringgodanu, mengingatkan bahwa secara regulasi, pengelolaan perlintasan rel berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian melalui Balai Pengelola Perkeretaapian.

Di sisi lain, PT KAI Divre IV Tanjungkarang justru mengambil

langkah hukum tegas terhadap aksi warga. Manager Humas KAI Divre IV, Azhar Zaki Assjari, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah resmi melaporkan sekelompok oknum ke Polresta Bandar Lampung pada Selasa (31/3).
Laporan ini dipicu oleh aksi nekat pemblokiran rel yang terjadi di lintas Garuntang – Sukamenanti, tepatnya di Jalan Sentot Alibasa, Kelurahan Ketapang, pada Rabu (25/3) lalu.

“Iya benar, kami telah melaporkan insiden tersebut. Kami tegaskan pentingnya kepatuhan terhadap aturan keselamatan. Aksi pemalangan jalur kereta api sangat berbahaya dan melanggar hukum,” ujar Zaki.

Ketegangan ini menunjukkan adanya gap besar antara tuntutan warga akan keamanan perlintasan dengan prosedur operasional PT KAI. Bunda Eva berencana menjadwalkan koordinasi intensif kembali dengan manajemen KAI untuk merumuskan solusi konkret agar insiden maut maupun aksi anarkis di perlintasan tidak terulang kembali.
Akankah koordinasi ini melahirkan palang pintu otomatis yang modern, atau justru memperpanjang daftar perselisihan di sepanjang rel Kota Tapis Berseri? (Nda)